



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 901/1344/BPT-PS / 2017

Nomor : 32 /DPRD-PS/ 2017

Tanggal : 24 Juli 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM RAPBD
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

Painan, 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Pelaksanaan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah disusun dalam RKPD tersebut, dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan APBD tahun berikutnya.

Penyusunan KUA tahun 2018 merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang mendasari sebagaimana disebut di atas yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Secara teknis, dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan APBD tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian KUA dan PPAS oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPA yang telah disepakati bersama tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun 2018 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Peraturan Daerah tentang APBD.

- 2) Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - b. Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2018 serta strategi pencapaiannya;
 - d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta strategi pencapaiannya;
 - e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
- 3) Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.

- 4) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, kepala daerah menyampaikan KUA dan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPA dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah adalah : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera". Visi tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis** : suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsive dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif

dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan (akta kelahiran , KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan. Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu infrastruktur perekonomian, infrastruktur sosial dan sektor unggulan daerah. Infrastruktur perekonomian yang dimaksud pada misi ini adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat dalam mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis. Pembangunan infrastruktur perekonomian menggunakan prinsip berkelanjutan melalui penerapan infrastruktur hijau sehingga manfaatnya tidak hanya untuk kekinian tetapi juga masa yang akan datang atau dengan kata lain, pembangunan infrastruktur tidak bertabrakan dengan lingkungan dan ekosistem.

Infrastruktur sosial yang dimaksud dalam misi ini adalah infrastruktur non fisik dalam bentuk kelembagaan dan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Sektor unggulan daerah yang dimaksud dalam misi ini adalah perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi PDRB terbesar (sektor unggulan) yaitu pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.

Misi ini mengandung dua kata kunci yaitu (1) mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dan (2) mengembangkan nilai budaya ABS-SBK. Yang dimaksud dengan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dalam misi ini adalah adanya saling menghargai dalam hal membangun hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia.

Yang dimaksud dengan nilai budaya ABS-SBK merupakan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjadi nilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai substantif tersebut yakni nilai Kebenaran, Kejujuran, Keadilan yang indikator pengamalannya terekam dalam Praktek Ibadah, Pola Pandang dan Karakter Masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) Peningkatkan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan. Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat dicapai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, dengan cara diantaranya: (1). Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2). Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi; (3). Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (4). Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan nilai tambah yang dimaksud dalam misi ini meliputi peningkatan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta pariwisata. Peningkatan nilai tambah dikategorikan menjadi dua yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Nilai tambah pengolahan meliputi kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Nilai tambah untuk pemasaran meliputi harga output produksi, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input selain bahan baku dan tenaga kerja. Peningkatan nilai tambah dapat dicapai melalui (1)

Meningkatkan mutu produksi dengan mengolah produk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; (2). Menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran produksi; (3). Mengefisiensikan biaya pengolahan; dan (4). Memperpendek mata rantai pemasaran.

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam misi ini adalah dalam rangka mewujudkan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah yang secara terus menerus dari hulu sampai hilir dengan pengembangan Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Misi lima memuat dua kata kunci yaitu (1) peran struktur sosial; dan (2) pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang. Peran struktur sosial yang dimaksud dalam misi ini merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Peran struktur sosial ditujukan untuk memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

Pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan indikator berfungsinya peran struktur sosial. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, sesuai dengan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, arah kebijakan pembangunan tahun 2018 tetap mengacu pada 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan;
4. Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing;
5. Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
6. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis;
7. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan;
8. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran;

9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima;
10. Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2018 adalah tersedianya landasan bagi penyusunan PPAS Tahun 2018 dan tersedianya pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018 yang dituangkan dalam bentuk *Nota Kesepakatan* antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah selama tahun 2016 dan 2017 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, penyusunan KUA 2018 memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2016 antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016- 2021);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

BAB II

KERANGKA INDIKATOR MAKRO DAERAH

A. Kondisi Perekonomian Nasional Tahun 2016 dan Awal Tahun 2017

Mengutip publikasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2018, secara umum diketahui bahwa di tengah ketidakpastian global, perekonomian domestik diharapkan tetap dapat tumbuh positif seiring dengan optimisme dan kinerja positif beberapa negara mitra dagang utama dan perekonomian kawasan. Optimisme kinerja perekonomian nasional ke depan juga didukung keberlanjutan program percepatan pembangunan infrastruktur, pengalokasian anggaran ke sektor produktif serta pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dengan tetap mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut perlu disertai dengan pengendalian laju inflasi pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan, dengan didukung oleh pergerakan nilai tukar rupiah pada level yang terjaga.

Pertumbuhan Ekonomi

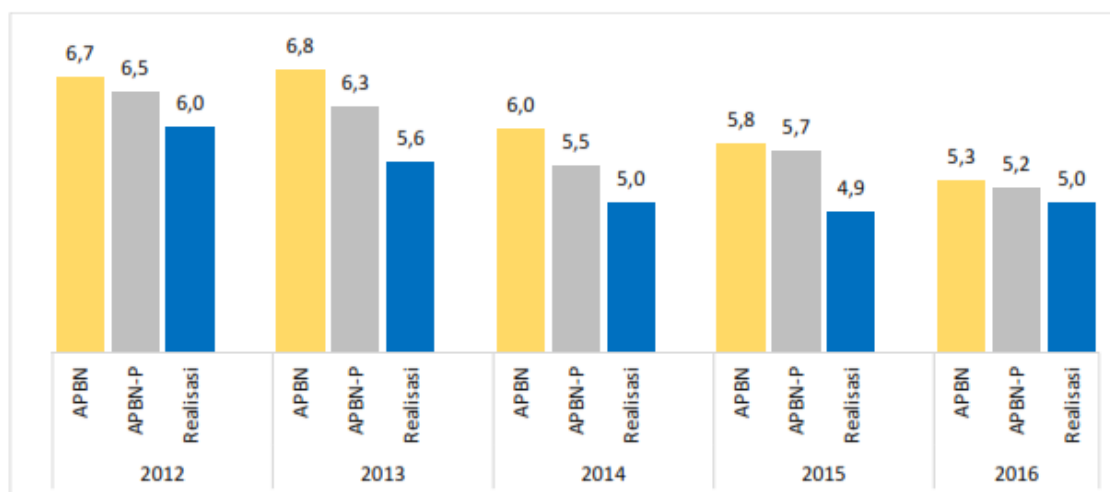
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah kebijakan fiskal sehingga penyusunan APBN, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan menjadi lebih kredibel. Oleh karena itu, penentuan besaran asumsi pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam pembangunan ekonomi mendatang.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung menurun sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016 merupakan masa-masa pemulihan ekonomi dari dampak krisis keuangan global tahun 2009. Ketidakpastian ekonomi global dan masih lemahnya volume perdagangan dunia sepanjang periode ini turut memberikan pengaruh pada ekonomi domestik, termasuk realisasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tren penurunan harga komoditas dunia, kebijakan tapertantrum oleh AS, kebijakan *debt ceiling* oleh negara-negara Eropa dan AS serta tren penurunan pertumbuhan Tiongkok turut mempengaruhi kinerja ekonomi global. Namun demikian, masih cukup baiknya domestic demand yaitu stabilnya konsumsi masyarakat dan membaiknya investasi, perkiraan perbaikan

perdagangan internasional, serta kinerja sektoral yang diperkirakan semakin meningkat memberikan optimisme terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN.

Gambar 2.1

Asumsi dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional (% YoY)



Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, diolah

Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0 dan setelahnya menunjukkan tren penurunan yang pada tahun 2015 mencapai titik terendah yaitu sebesar 4,9 persen. Namun demikian, pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan yaitu tumbuh sebesar 5,0 persen. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga seiring dengan inflasi yang terjaga, pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak multiplier pada aktivitas ekonomi dalam negeri. Selain itu, perbaikan kinerja perdagangan internasional juga terjadi, meskipun pertumbuhan ekspor dan impor masih negatif, namun pertumbuhan negatif tersebut tidak sedalam tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2017, pertumbuhan PDB pada kuartal I 2017 menunjukkan keberlanjutan perbaikan ekonomi domestik. Pada kuartal I 2017, pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,0 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 4,9 persen. Peningkatan kinerja ekspor dan impor yang cukup signifikan sejak akhir tahun 2016 menjadi faktor pendorong ekonomi. Selain itu, konsumsi dan investasi yang tumbuh relatif stabil turut mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2017.

Sepanjang tahun 2017, tren peningkatan harga komoditas global, termasuk batu bara, diperkirakan terus berlanjut dan menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja

pertumbuhan ekspor beberapa kuartal ke depan. Tidak hanya pada perdagangan internasional, tren tersebut juga diperkirakan mampu meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan terutama pada sektor yang terkait dengan sektor pertambangan. Dampak positif peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor tersebut terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan mulai terjadi pada paruh kedua tahun 2017. Selain faktor tersebut, pertumbuhan ekonomiglobal dan volume perdagangan ekonomi dunia yang diperkirakan membaik diharapkan turut mendorong perekonomian nasional. Perekonomian tahun 2017 diperkirakan mampu tumbuh lebih baik dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi nasional terutama ditopang oleh sektor industry pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sektor jasa-jasa. Secara umum, sektor kunci dimaksud mengalami perlambatan pertumbuhan dalam periode 2012-2016. Pada tahun 2016 seluruh sector mencatatkan kinerja positif dan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2015. Selanjutnya, kinerja positif dimaksud diperkirakan dapat berlanjut di tahun 2017 dan 2018.

Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dalam perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 21,0 persen dalam lima tahun terakhir. Namun demikian dalam periode tersebut, sektor ini tumbuh rata-rata sebesar 4,7 persen atau berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh 5,6 persen namun kemudian melambat menjadi sebesar 4,3 persen pada tahun 2016. Perlambatan pertumbuhan yang dialami sektor industri pengolahan disebabkan permasalahan baik dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, kurang kondusifnya perekonomian global dan pelemahan harga komoditas menjadi faktor yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk hasil industri. Sementara itu dari sisi domestik, sektor industri nasional masih mengalami beberapa kendala struktural, terkait rendahnya inovasi dan teknologi, belum optimalnya kapasitas produksi, dan rendahnya daya saing yang diakibatkan ekonomi biaya tinggi. Pada 2017, kinerja sektor ini diperkirakan membaik sejalan dengan perbaikan infrastruktur dan iklim investasi melalui pemberian insentif dan paket-paket kebijakan ekonomi.

Pada tahun 2018, Sektor Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9-5,7 persen. Upaya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan diarahkan melalui beberapa hal. Pertama, pendalaman industri dan upgrading produk melalui hilirisasi pada industri berbasis sumber daya alam. Kedua, peningkatan daya saing dan produktivitas melalui penyediaan energi yang kompetitif bagi industri, pengembangan

keahlian SDM, serta peningkatan inovasi dan teknologi industri. Ketiga, peningkatan akses ekspor baik dengan negara mitra dagang utama maupun pengembangan pasar non-tradisional negara tujuan ekspor.

INFLASI

Laju inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, laju inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi juga akan mempengaruhi garis batas angka kemiskinan. Dalam kaitan ini, pemerintah akan terus menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah sehingga tidak terjadi tekanan pada jumlah masyarakat miskin.

Dalam 5 tahun terakhir, fluktuasi perekonomian global telah memiliki pengaruh cukup besar terhadap laju inflasi domestik melalui perkembangan harga komoditas energi serta pergerakan nilai tukar. Dalam kaitan ini, fluktuasi harga komoditas global juga menyebabkan terjadinya perbedaan antara asumsi tingkat inflasi dalam APBN/APBNP dibandingkan dengan realisasinya.

Pada tahun 2015, asumsi laju inflasi pada APBN dan APBNP sebesar 4,4 dan 5,0 persen. Realisasi laju inflasi mencapai 3,4 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi. Hal ini terutama disebabkan oleh moderasi pertumbuhan ekonomi dan tren penurunan harga minyak dunia. Pada saat yang sama, dampak base effect tingkat IHK pada tahun sebelumnya menyebabkan rendahnya laju inflasi di tahun 2015.

Tren penurunan laju inflasi masih berlanjut hingga tahun 2016. Di dalam APBN dan APBNP, laju inflasi diasumsikan mencapai 4,7 dan 4,0 persen. Namun, dalam realisasinya, laju inflasi dapat dijaga pada tingkat yang lebih rendah, sebesar 3,0 persen (yoy). Selain menurun dibanding inflasi tahun sebelumnya, laju inflasi tahun 2016 juga merupakan inflasi terendah dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga diatur Pemerintah.

Di tahun 2017, laju inflasi diperkirakan meningkat namun tetap berada pada kisaran sasaran inflasi 4+1 persen. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan kapasitas produksi domestik serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, terdapat beberapa faktor risiko tekanan inflasi pada tahun 2017, terutama berasal dari kelanjutan program pemerintah

untuk menciptakan kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran serta tren peningkatan harga energi di pasar global.

Di tahun 2018, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga dalam rentang sasaran inflasi. Perbaikan kapasitas produksi nasional yang didukung program-program untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi harga akan mampu menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam negeri. Sementara dari sisi eksternal, faktor tekanan harga komoditas global masih relatif rendah. Faktor risiko inflasi masih mungkin dihadapi sebagai akibat dampak cuaca terhadap harga komoditas pangan namun kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi akan terus dijalankan untuk memitigasi sumber tekanan tersebut.

NILAI TUKAR RUPIAH

Selama periode 2012-2016, nilai tukar Rupiah berada dalam tren pelemahan akibat tekanan global maupun domestik dan mencapai puncaknya di tahun 2015. Sebagaimana tercermin pada kenaikan Indeks Dolar Harga Disesuaikan (Price-Adjusted Dollar Index), kenaikan nilai mata uang dolar AS lebih dipicu oleh kenaikan harga aset keuangan AS secara relative terhadap aset keuangan negara lainnya, menyusul ekspektasi pengetatan kebijakan moneter AS oleh The Fed yang dimulai dari penghentian program pembelian aset (Fed tapering) di tahun 2013 dan kenaikan suku bunga acuan AS (Fed Fund Rate – FFR) di akhir tahun 2015.

Pergerakan nilai tukar Rupiah juga dipengaruhi oleh keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia baik dari sisi Transaksi Berjalan maupun Transaksi Modal Finansial. Selama periode 2012-2014, terjadi defisit Transaksi Berjalan terutama yang disebabkan oleh defisit Neraca Perdagangan. Sementara dari sisi Transaksi Modal dan Finansial, dalam periode tersebut terdapat peningkatan arus modal masuk, terutama pada instrumen investasi portofolio. Peningkatan ini didorong oleh preferensi investor global untuk menanamkan modal ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Kedua kondisi ini memberikan dampak yang berbeda terhadap pergerakan nilai tukar, namun secara umum tekanan depresiasi relatif lebih besar.

Selama tahun 2016, terdapat perkembangan positif seperti laju inflasi yang terjaga di tingkat yang cukup rendah. Rendahnya inflasi disertai dengan stabilnya nilai tukar telah memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pelonggaran arah kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga acuan BI serta pelonggaran kebijakan makroprudensial tanpa menyebabkan arus modal keluar. Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak juga telah memberikan dampak positif pada perekonomian,

khususnya besarnya aliran dana masuk di tahun 2016 melalui jalur repatriasi. Hal ini juga memberikan perkembangan positif pada kinerja neraca modal dan finansial dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di tahun 2016, terutama melalui investasi lainnya. Namun demikian selain dampak dari pengampunan pajak, Neraca Pembayaran Indonesia khususnya Transaksi Modal dan Finansial masih didorong oleh positifnya persepsi pelaku ekonomi terhadap perekonomian domestik sehingga turut menaikkan surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Secara umum nilai tukar Rupiah pada periode 2012-2016 mengalami depresiasi sebesar 42 persen yaitu dari rata-rata nilai tukar Rp9.380 per dolar AS menjadi Rp13.307 per dolar AS.

Selama kuartal I 2017, rata-rata nilai tukar Rupiah adalah Rp13.321 per dolar AS, lebih kuat dibanding akhir tahun 2016. Walaupun pada bulan Maret 2017 The Fed telah menaikkan FFR, dampak terhadap nilai tukar relatif minimal karena telah diantisipasi oleh pasar. Secara umum, perkembangan nilai tukar di tahun 2017 diperkirakan masih mengalami depresiasi. Pada saat yang sama, tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga pada tingkat yang rendah. Pergerakan nilai tukar tersebut didasarkan pada faktor negatif dan juga faktor positif. Faktor negatif yang menyebabkan tekanan pelemahan rupiah antara lain datang dari dampak rencana kenaikan FFR dua kali lagi di tahun 2017. Di sisi lain terdapat faktor positif yang akan menghambat depresiasi Rupiah lebih dalam baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, membaiknya perekonomian nasional, keberhasilan program pengampunan pajak, akselerasi pembangunan proyek – proyek infrastruktur, dan terjaganya tingkat inflasi, akan memberikan dorongan apresiasi Rupiah. Sementara dari sisi eksternal, menurunnya defisit transaksi berjalan, serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial juga akan memberikan kontribusi positif pada pergerakan nilai tukar. Dengan tantangan internal dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan fiskal dalam mendorong percepatan reformasi guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi dan moneter-makroprudensial yang berhati-hati serta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah di tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp13.500 per dolar AS.

Di tahun 2018, pergerakan nilai tukar Rupiah juga akan tetap dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, kebijakan ekonomi AS di bawah administrasi pemerintahan yang baru diperkirakan mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional baik secara langsung terhadap mitra dagangnya maupun melalui dampak tidak langsung.

B. Prospek Ekonomi Daerah

Secara spasial, struktur perekonomian pada periode 2012-2016 tidak mengalami banyak perubahan. Perekonomian nasional masih ditopang oleh kawasan barat Indonesia, yakni pulau Jawa dan Sumatera dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 57,9 persen dan 22,8 persen. Sementara itu, kontribusi pulau lain seperti Kalimantan, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku serta Papua tercatat masih di bawah 10 persen.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa selalu berada di atas pertumbuhan nasional dengan rata-rata sebesar 5,8 persen. Di tengah kondisi global yang kurang kondusif, kinerja perekonomian Jawa relatif stabil dengan dukungan sektor industry dan perdagangan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera cenderung terus menurun, namun kembali meningkat pada tahun 2016. Kinerja perekonomian Sumatera yang utamanya disumbang oleh sektor pertanian dan sektor industri turut mengalami perlambatan akibat penurunan harga komoditas global, khususnya harga Crude Palm Oil (CPO). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera dalam lima tahun terakhir sebesar 4,6 persen.

Tabel 2.1 Perkembangan PDRB Kawasan Tahun 2012-2016 (% YoY)

Kawasan	2012	2013	2014	2015	2016	Kontribusi terhadap PDB Nasional*
Sumatera	5,7	5,0	4,6	3,5	4,3	22,8
Jawa	6,4	6,0	5,6	5,5	5,6	57,9
Bali dan Nusa Tenggara	4,0	6,0	5,9	10,4	5,9	2,9
Kalimantan	5,7	3,9	3,4	1,4	2,0	8,2
Sulawesi	9,0	7,7	6,9	8,2	7,4	5,7
Maluku dan Papua	3,2	7,7	4,5	6,4	7,4	2,4

*Rata-rata 2012-2016

Sumber: BPS, Kemenkeu, diolah

Kinerja perekonomian Pulau Kalimantan dan Maluku-Papua juga cenderung melambat dalam lima tahun. Perlambatan ini seiring dengan penurunan permintaan dan harga batubara dan minyak bumi di pasar global. Sektor pertambangan, yang merupakan sektor utama pembentuk PDRB di kedua kawasan tersebut mengalami tekanan akibat penurunan harga yang cukup signifikan. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing sebesar 3,3 persen dan 5,8 persen.

Di sisi lain, Pulau Sulawesi dan Bali-Nusa Tenggara menunjukkan kinerja perekonomian yang cukup baik. Rata-rata pertumbuhan kedua wilayah ini relatif tinggi

dibandingkan wilayah lainnya yakni masing-masing sebesar 7,8 persen dan 6,4 persen. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara utamanya disumbang oleh sektor pertanian dan sektor penyedia akomodasi & makan minum, sedangkan perekonomian Sulawesi didukung oleh sektor pertanian dan konstruksi. Meskipun kedua wilayah ini tumbuh cukup tinggi, dampak terhadap perekonomian nasional masih kurang signifikan karena porsi terhadap perekonomian nasional masih relative kecil.

Pada tahun 2017, secara spasial, diperkirakan perekonomian seluruh kawasan menunjukkan peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Perkiraan perbaikan pada sektor industri akan sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi kewilayahannya. Pada tahun 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan timur dengan meningkatkan keterkaitan ekonomi dengan kawasan lain. Kawasan Maluku Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Bali Nusa Tenggara diupayakan dapat meningkatkan keterkaitan dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi ini. Selain itu, pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah terluar namun juga perekonomian secara nasional.

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2018 hingga 2021 diperkirakan terus membaik dengan dukungan kondisi ekonomi global yang juga diperkirakan terus mengalami perbaikan. Pertumbuhan volume perdagangan internasional diperkirakan mendukung momentum perbaikan ekonomi domestik melalui peningkatan ekspor, baik komoditas mineral maupun hasil industri. Namun demikian, sebagaimana telah dipahami bersama, salah satu isu penting yang dihadapi Indonesia dalam jangka menengah-panjang adalah risiko middle income trap, yang merupakan tantangan bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera secara merata. Berbagai kajian yang telah dilakukan mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi risiko tersebut, dibutuhkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan teratasinya masalah ketimpangan yang masih ada. Pemerintah akan terus mengarahkan strategi pembangunan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun. Aspek inklusifitas akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan demikian, jalannya pembangunan Indonesia

akan lebih mampu mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata.

Penguatan sumber-sumber pertumbuhan dan keterkaitan perekonomian antar wilayah akan terus menjadi strategi pembangunan mendasar selama beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui berbagai upaya seperti sinkronisasi kebijakan investasi pusat dan daerah serta kemudahan izin usaha. Penguatan infrastruktur yang lebih merata di berbagai daerah menjadi bagian penting dari implementasi strategi pembangunan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan daya saing dan kapasitas produksi berlandaskan kemampuan dan karakteristik daerah akan terus diperkuat untuk lebih memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Penguatan perekonomian domestik juga akan terus ditempuh, khususnya untuk mengatasi berbagai tantangan eksternal yang mungkin terjadi. Langkah-langkah tersebut juga akan disertai perbaikan-perbaikan regulasi dan administrasi pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada melalui keberlanjutan reformasi anggaran dalam rangka mewujudkan anggaran yang lebih efisien, produktif, dan sustain. Dengan berbagai program dan kebijakan pembangunan tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh tinggi serta target pembangunan lainnya seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat dicapai. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pemerintah akan terus mengupayakan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan di periode 2019 hingga 2021 pada kisaran 5,9 hingga 6,9 persen.

PEREKONOMIAN WILAYAH SUMATERA

Dikutip dari Laporan Nusantara Mei 2017 yang dirilis oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa perekonomian Sumatera pada triwulan I 2017 tumbuh mencapai 4,05% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,49% (yoy) terutama disebabkan realisasi investasi yang lebih rendah ditengah peningkatan konsumsi dan ekspor. Sementara itu, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan terutama didorong selain oleh realisasi yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, juga oleh transfer DAU yang sempat tertunda di tahun lalu.

Di sisi lain, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah di Sumatera turut mendorong aktivitas ekonomi seiring terjadinya akselerasi pertumbuhan konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga. Dari sisi sektoral, perlambatan ekonomi lebih dalam di sektor pertambangan dan penggalian dapat tertahan oleh peningkatan kinerja sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Musim panen raya yang terjadi di triwulan I, setelah di tahun lalu mengalami pergeseran di triwulan II, member dampak signifikan

terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Sejalan dengan itu, peningkatan harga komoditas dan perbaikan kinerja ekspor memberi dampak positif terhadap kinerja sektor industri.

Penurunan tekanan inflasi masih berlanjut, dengan inflasi pada triwulan laporan mencapai 3,92% (yoy). Penurunan tersebut terutama bersumber dari penurunan tekanan inflasi volatile foods seiring dengan musim panen raya dan kelancaran distribusi antar daerah sehingga pasokan pangan mencukupi. Namun penurunan tersebut sedikit tertahan oleh kenaikan harga kelompok administered prices sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif STNK dan melakukan penyesuaian tarif listrik di awal tahun.

Dengan adanya perbaikan harga komoditas, tekanan risiko terhadap sektor keuangan di Sumatera relatif berkurang sehingga memberi dampak terhadap membaiknya kinerja sektor keuangan meskipun masih terbatas. Penghimpunan DPK terus mengalami peningkatan, dan tingkat NPL juga masih relatif terjaga. Ke depan, masih perlu dicermati tendensi penurunan kualitas kredit terutama pada sektor konstruksi.

Perekonomian di Sumatera tahun 2017 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Kinerja investasi diperkirakan relatif membaik ditopang oleh masih berlanjutnya proyek infrastruktur strategis. Sementara inflasi Sumatera pada akhir 2017 diproyeksikan mengalami penurunan dan diperkirakan masih akan berada pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar $4\pm 1\%$, didukung oleh koordinasi dan sejumlah program pengendalian inflasi dalam TPID.

PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

Berdasarkan hasil Kajian Ekonomio dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Barat untuk bulan laporan Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2017 terpantau mengalami perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I 2017 tumbuh sebesar 4,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 4,86% (yoy). Penopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan berasal dari peningkatan aktivitas konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta adanya perbaikan kinerja ekspor. Peningkatan harga komoditas internasional (CPO dan karet) diindikasikan berdampak pada kenaikan konsumsi rumah tangga karena meningkatnya daya beli, mengingat sebagian besar masyarakat bergantung pada kedua komoditas tersebut. Selain itu, kenaikan harga komoditas yang disertai dengan peningkatan permintaan negara mitra dagang menyebabkan ekspor luar negeri membaik pada triwulan laporan. Di sisi lain, konsumsi pemerintah mencatat

peningkatan akibat adanya kenaikan APBD tahun 2017 serta sebagai imbas dari base effect penundaan DAU pada triwulan III dan IV 2016. Namun, konsumsi pemerintah tertahan lebih lanjut seiring dengan masih terbatasnya kegiatan pemerintah di awal tahun.

Secara sektoral, pendorong utama perbaikan ekonomi Sumatera Barat adalah peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian dan transportasi pergudangan. Dari sisi pertanian, peningkatan kinerja lapangan usaha tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi tanaman bahan makanan (tabama) akibat pergeseran musim tanam di triwulan III ke triwulan IV 2016 yang berakibat peningkatan panen pada triwulan laporan. Membaiknya kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan terutama merupakan imbas dari penambahan armada dan rute perjalanan sub kategori angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Sementara itu, Laju inflasi Sumbar pada triwulan I 2017 mereda terutama disebabkan turunnya tekanan pada kelompok bahan makanan. Secara tahunan, laju inflasi Sumatera Barat pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 3,82 (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,89% (yoy). Panen komoditas hortikultura yakni cabai merah dan bawang merah serta terjaganya pasokan beras seiring panen dan operasi pasar oleh Bulog, menjadi faktor utama menurunnya tekanan inflasi pada triwulan I 2017. Dengan besaran inflasi tersebut, Provinsi Sumatera Barat tercatat sebagai provinsi dengan laju inflasi tahunan urutan ke-18 tertinggi secara nasional. Namun, pada triwulan II 2017, tekanan inflasi diperkirakan meningkat signifikan seiring datangnya siklus Ramadhan dan Lebaran (sisi permintaan) dan mulai berakhirnya panen beras dan cabai (sisi permintaan). Di sisi volatile foods, tekanan harga diperkirakan bersumber dari komoditas pangan dan hortikultura seperti beras, cabai merah, bawang merah dan jengkol.

Membaiknya perekonomian pada awal tahun 2017 memberikan dampak positif terhadap perbaikan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut tercermin dari kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja yang diiringi dengan relatif menurunnya tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja masih (Februari 2017) didominasi sektor pertanian dan perdagangan namun persentasenya cenderung turun dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya peralihan tenaga kerja ke sektor lain terutama industri pengolahan dan sektor jasa. Di sisi lain, status pekerja di Sumatera Barat sebagian besar berada di lapangan kerja informal. Masih terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal menyebabkan pengangguran terdidik masih tinggi.

Di sisi lain, perlambatan aktivitas perekonomian pada tahun 2016 berimbas pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan indeks keparahan kemiskinan menjadi indikasi penurunan kesejahteraan daerah. Meski demikian, perkembangan kualitas hidup masyarakat masih baik terindikasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan rasio gini. Peningkatan penduduk miskin tersebut terutama terjadi pada masyarakat pedesaan, sementara penduduk miskin masyarakat perkotaan relatif stabil. Di sisi lain, kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat cenderung meningkat sebagaimana tercermin dari membaiknya IPM, diikuti dengan perbaikan pada ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi penduduk di Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi dan arah perekonomian Nasional dan Sumatera Barat di atas, tentunya perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Sumatera Barat. Perkembangan indikator makro pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan beberapa tahun terakhir dan target pencapaian tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perkembangan dan Target Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Pesisir Selatan 2015 - 2018

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi		Prakiraan	Target
		2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,54	5.30	5,5 - 6,08	6,27
2	PDRB Perkapita Berlaku (Rp)	22.849.248,30	24.120.000,-	26.250.000,-	28.160.000,-
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	92,57	92.08	92,53	92,99
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	11,69	11,69*	9,48	9,37
5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	68.07	68,34	69,92	69,92
6	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,11	8,12	8,64	8,65
7	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,96	70.11	70,00	70,2

Keterangan : *) : data/angka sementara

Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai dengan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka kebijakan makro ekonomi diarahkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengupayakan terciptanya transformasi struktur ekonomi

daerah menuju industrialisasi sektor potensial. Dengan kebijakan ini diharapkan kedepannya akan terbuka lapangan kerja yang lebih luas melalui peningkatan investasi swasta. Langkah-langkah kebijakan yang akan diambil yaitu:

1. Mengatasi pengangguran melalui penyediaan kesempatan kerja. Adapun langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas kesempatan kerja yaitu: meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, membantu dan mendorong wirausaha baru, menyediakan informasi tentang lowongan kerja, dan lain-lain.
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah proses perizinan melalui dan pemberian insentif fiskal bagi wirausaha baru dan UMKM.
3. Penyediaan infrastruktur untuk menunjang perekonomian seperti pembangunan jalan-jalan agropolitan dan minapolitan, jalan menuju daerah tertinggal, serta meningkatkan transportasi daerah.
4. Mengembangkan kawasan ekonomi dan destinasi wisata termasuk percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.
5. Pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dalam arti luas serta pengembangan ekonomi kreatif yang sudah mulai tumbuh.
6. Membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi kebijakan nasional yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata maka pembangunan ekonomi di Pesisir Selatan harus memperhatikan masalah lingkungan melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: penghutan kembali, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi yang ramah lingkungan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan APBD Tahun 2018. RKP tahun 2018 disusun untuk dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spatial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/ program prioritas / kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2018

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran pembangunan sebagai jangkar arah program kerja yang akan dilaksanakan. Di dalam RPJMN 2015-2019 telah disusun beberapa sasaran pembangunan terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi serta indikator kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran tersebut menghadapi berbagai kendala dan tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dan kendala tersebut menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap sasaran-sasaran pembangunan agar lebih realistis di periode yang akan datang.

Berdasarkan kinerja dua tahun terakhir terlihat bahwa pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi berada di atas 6 persen masih cukup berat. Pada periode 2015-2016, pertumbuhan hanya mampu tercapai masing-masing sebesar 4,9 persen dan 5,0 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan ini terutama disebabkan akibat masih lesunya perekonomian global khususnya melalui dampak perdagangan internasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian guna mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi secara berkelanjutan.

Pemerintah juga berupaya keras untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perluasan lapangan kerja dan stabilitas harga, telah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 10,70 persen pada September 2016 dari 11,22 persen pada September 2015. Namun angka tersebut masih berada di atas sasaran yang ingin dicapai Pemerintah. Di samping itu, masih terdapat sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang masih rentan miskin dan memiliki risiko kembali jatuh miskin apabila terjadi guncangan.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2014 - 2018

INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan ekonomi, APBN(P) (%)	5,5	5,7	5,2	5,1	-
- Angka Realisasi	5,0	4,9	5,0	-	-
- APBN 2017	-	-	-	5,1	-
- Angka Perkiraan	-	-	-	5,2	5,4-6,1
Tingkat Pengangguran Terbuka, RKP (%)	5,6-5,9	5,5-5,7	5,2-5,5	5,3-5,6	5,1-5,4
- Angka Realisasi	5,94	6,18	5,61	-	-
- APBN 2017	-	-	-	5,60	-
- Angka Perkiraan	-	-	-	5,50	-
Angka Kemiskinan, RKP (%)	9,0-10,0	9,0-10,0	9,0-10,0	9,5-10,5	9,0-10,0
- Angka Realisasi	10,96	11,13	10,70	-	-
- APBN 2017	-	-	-	10,50	-
- Angka Perkiraan	-	-	-	10,40	-
Rasio Gini, RKP	n.a.	0,41	0,39	0,38	0,38
- Angka Realisasi	0,41	0,41	0,39	-	-
- APBN 2017	-	-	-	0,39	-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), RKP	73,8	74,8	75,3	75,7	71,38
- Angka Realisasi*	68,90	69,55	70,19	-	-
- APBN 2017*	-	-	-	70,10	-

Keterangan: * IPM dihitung dan diperkirakan dengan metode baru

Sumber: Bappenas dan BPS

TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Beberapa tantangan utama pembangunan yang perlu menjadi perhatian utama di tahun 2018 diantaranya:

(1) Kemiskinan dan Kesenjangan

Analisis kemiskinan dinamis menunjukkan masih terdapat sekitar 5-6 persen penduduk yang secara persisten berada di bawah garis kemiskinan. Kelompok ini tinggal tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sehingga menyulitkan penanganannya. Di sisi lain, terdapat sekitar 30 persen kelompok rumah tangga yang tergolong rentan terhadap perubahan.

Dalam hal kesenjangan pendapatan, pertumbuhan konsumsi riil per kapita pada kelompok masyarakat atas mencapai rata-rata 8-14 persen per tahun, kelompok masyarakat menengah rata-rata 5-8 persen per tahun, sedangkan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin rata-rata hanya 3-5 persen per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat.

(2) Pengangguran dan Kapasitas Produksi Nasional;

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan yakni dari 6,14 persen di Agustus 2012 menjadi 5,61 persen di Agustus 2016. Namun demikian, penyerapan tenaga kerja dari setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan angka penyerapan tenaga kerja tersebut belum mampu mengurangi pekerja rentan secara signifikan. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah rendahnya kualitas pekerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia yang disebabkan oleh produktivitas dan tingkat pendidikan rendah. Di sisi lain, ketidaksesuaian

Selain sisi ketenagakerjaan, keterbatasan dari sisi penawaran di dalam negeri untuk memenuhi permintaan dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam periode sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi terutama bertumpu pada peningkatan dari sisi permintaan. Namun, karena keterbatasan sisi penawaran, kondisi tersebut menyebabkan overheating perekonomian yang tergambar dari tingginya inflasi. Pada saat yang sama, permintaan tinggi tidak dapat diimbangi oleh pasokan dari dalam negeri sehingga mendorong kenaikan

impor. Faktor ini pada gilirannya menyebabkan meningkatnya defisit neraca perdagangan.

(3) Kapasitas Fiskal;

Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah juga masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan pertama bersumber dari perlunya pelebaran ruang fiskal untuk membiayai pembangunan yang inklusif. Pelebaran ruang fiskal perlu terus dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBP. Dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang masih relatif terbatas, perlu terus dikembangkan pembiayaan kreatif (creative financing) dengan mendorong peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah.

(4) Stabilitas Ekonomi Makro; dan

Pertumbuhan ekonomi global belum kembali pada tingkat sebelum krisis ekonomi global. Tantangan yang dihadapi oleh perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir juga cukup berat, seperti terjadinya krisis utang Eropa, taper tantrum, pelemahan harga komoditas, serta moderasi ekonomi Tiongkok. Berbagai peristiwa tersebut silih berganti memberi tekanan dan menciptakan ketidakpastian di lingkungan ekonomi global dalam satu dekade terakhir.

(5) Perubahan Iklim.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh sektor berbasis komoditas yang mempunyai dampak negatif terhadap iklim dan lingkungan. Indonesia merupakan negara penghasil emisi karbon nomor 8 terbesar di dunia yang berkontribusi sebanyak 1,76 persen dari total gas rumah kaca dunia (WRI, 2012). Salah satu konsekuensi negatif dari emisi karbon adalah perubahan iklim, melalui perubahan pola cuaca, yang akan mengancam masyarakat miskin Indonesia terutama petani, nelayan dan masyarakat pesisir pantai. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dapat mengakibatkan risiko krisis air, pangan dan energi dan selanjutnya dapat mengancam kesinambungan pembangunan.

ARAH KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

Kebijakan fiskal diarahkan untuk pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini diterjemahkan melalui upaya pembangunan

ekonomi yang mampu meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan.

Secara umum upaya perluasan kesempatan kerja ditempuh dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat daya saing tenaga kerja. Namun demikian upaya perluasan kesempatan kerja masih menghadapi tantangan, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Tantangan pada sisi penawaran antara lain (i) perlunya mendorong iklim investasi melalui deregulasi, perbaikan hubungan industrial ketenagakerjaan, dan efisiensi sistem logistik, dan (ii) peningkatan daya dukung infrastruktur untuk memperkuat daya saing investasi. Sementara itu tantangan pada sisi permintaan terutama dihadapkan pada adanya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (skill gap) dan daya saing tenaga kerja yang masih belum optimal.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan meningkatkan investasi dan memperkuat daya beli masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing investasi. Sementara itu untuk peningkatan daya beli ditempuh dengan mendorong efektifitas program perlindungan sosial. Pada sisi lain upaya untuk menggerakkan sektor riil, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing ditempuh melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan keterampilan (vokasional), perbaikan mutu layanan kesehatan, pelaksanaan proyek padat karya, peningkatan akses permodalan, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, Pemerintah akan menggunakan instrumen kebijakan fiskal dari sisi pendapatan (pajak) untuk redistribusi pendapatan dan dari sisi belanja yang difokuskan pada belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

3.2 SASARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2018

Untuk mencapai target indikator makro ekonomi tahun 2018, Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi nasional serta internal Provinsi Sumatera Barat. Berikut dijelaskan asumsi-asumsi tertentu sebagai prasyarat tercapainya rencana target makro pekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Memperhatikan target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 serta kondisi makro ekonomi Pesisir Selatan, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 ditargetkan pada kisaran 6,28 persen. Besaran laju pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai dengan asumsi adanya penguatan kinerja ekspor provinsi terhadap perekonomian.
2. Asumsi yang digunakan dalam proyeksi indikator ekonomi Pesisir Selatan tahun 2017 berasal dari eksternal dan domestik. Ditargetkan laju inflasi terkendali pada kisaran 5 persen. Perkiraan laju inflasi tersebut dapat dicapai, dengan pertimbangan pada tahun 2018 kondisi perekonomian diprediksikan lebih baik dibanding 2017.
3. Pada tahun 2018 persentase tingkat pengangguran terbuka diperkirakan akan menurun di bawah 2 digit yang ditargetkan pada angka 9,37 persen. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa dengan membaiknya perekonomian nasional akan berimbas pada meningkatnya kegiatan industri terutama yang berorientasi pada tenaga kerja. Namun demikian, karena belum pulih sepenuhnya, masih diperlukan adanya program-program dari pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengurangi jumlah pengangguran, misalnya melalui program pemberian kerja sementara yang bersifat padat karya, peningkatan kesempatan kerja, serta program desa membangun dan menumbuhkan semangat kemandirian dan berdaya saing melalui budaya masyarakat bekerja.
4. Tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, diharapkan dapat menurun sehingga mencapai angka 7,01 persen pada tahun 2018, seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di Pesisir Selatan di tahun 2017. Perkiraan penurunan tingkat kemiskinan penduduk, perlu didukung dengan strategi pembangunan Pesisir Selatan yang tepat sasaran.

Untuk mencapai target dan asumsi kondisi ekonomi makro Pesisir Selatan ini diperlukan dukungan perencanaan Pemerintahan Daerah yang hati-hati dan cermat. Hal ini berimplikasi pada penerapan program dan kegiatan yang tepat sasaran dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mempunyai daya ungkit dan mendukung ketercapaian target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama komponen daya beli dan perbaikan indeks pendidikan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2000, jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 11 jenis meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan serta perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan untuk retribusi daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Perkembangan target PAD Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 41.76 persen, sebagaimana pada Tabel 4.1. yang memperlihatkan perkembangan realisasi PAD yang sangat fluktuatif. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Tabel 4.1
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017

Tahun	PAD (Rp.)	Pertumbuhan
2013	49,684,274,492	183.68
2014	86,699,821,743	74.50
2015	91,084,864,666	5.06
2016	108,915,294,628	19.58
2017	116,095,536,070	6.59
Rata-rata Pertahun		57.88

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2016

Catt : Data tahun 2013-2016 merupakan Realisasi APBD dan Data Tahun 2017 Adalah target PADA dalam APBD tahun 2017

Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2018, maka pada tahun 2017 ini perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah.
2. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 4.03 persen, secara umum dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Pesisir Selatan sangat menggantungkan penerimaan dari transfer dana dari Pemerintah Pusat. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 – 2017

Tahun	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi PAD (%)
2013	40,254,884,212	129.84	1,029,266,035,289	3.91
2014	49,684,274,492	23.42	1,196,345,494,552	4.15
2015	86,699,821,743	74.50	1,282,476,125,921	6.76
2016	108,915,294,628	25.62	1,608,623,595,305	6.77
2017	116,095,536,070	6.59	1,608,623,595,305	7.22
Rata-rata Pertahun		52.00		5.76

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2017

Catt : Data tahun 2010-2013 merupakan Realisasi APBD dan Tahun 2015

berdasarkan data APBD tahun 2015

Kebijakan anggaran tahun 2018 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui :
 - Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan membentuk Unit Pengelola Terpadu (UPT), perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dan pihak swasta dalam penggalan sumber – sumber pendapatan asli daerah.
 - Ektensifikasi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian – pengkajian terhadap sumber – sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru.
 - Membenahi sistem pemungutan PAD
 - Menyempurnakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada awal tahun 2017 sebagai implikasi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, upaya pemerintah dalam mencapai target yaitu dengan :
 - Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun propinsi dalam meningkatkan penggalan sumber -sumber pendapatan
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukaan pajak (Bonus PBB, PPh Pasal 21, dll); peningkatan bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para investor dan pihak swasta dalam menggali potensi pendapatan daerah
 - Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 1.041.431.885.063,- turun sebesar Rp. 428.454.970.753,- dibanding tahun 2017 sebesar Rp. 1.469.886.855.816,- yang terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prediksi PAD untuk tahun 2018 sebesar Rp. 71.632.111.698,- 1.117.004.366.285,- naik sebesar Rp. 908.830.215,-,- bila dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu sebesar Rp.116.095.536.070,-. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 15.923.585.698,-, Retribusi daerah Rp. 12.265.364.000,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan sebesar Rp. 5.500.000.000,- dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 83.315.416.587,-.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan tahun 2018, baru dapat diproyeksikan sebesar Rp. 873.826.840.718,- turun sebesar Rp. 269.037.333.282,- bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 1.142.864.174.000,-. Penurunan ini disebabkan karena Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus belum dimasukkan dalam perhitungan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.50.600.678.060,-. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 160.326.467.686,- dibandingkn dengan taret tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena beberapa potensi pendapatan belum bisa dimasukkan kedalam proyeksi karena belum ada penetapan resmi dari instansi berwenang yaitu terkait Dana Desa dan Dana Insentif Daerah.

Secara rinci target pendapatan daerah tahun 2018 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Target Pendapatan Daerah Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Proyeksi Anggaran 2018 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	116,095,536,070	117,004,366,285	908,830,215
1.1.1	Pajak Daerah	14,505,585,698	15,923,585,698	1,418,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	12,265,364,000	12,265,364,000	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5,100,000,000	5,500,000,000	400,000,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84,224,586,372	83,315,416,587	(909,169,785)
				-
1.2	Pendapatan Dana Perimbangan	1,142,864,174,000	873,826,840,718	(269,037,333,282)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	22,540,647,000	20,740,726,718	(1,799,920,282)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	853,086,114,000	853,086,114,000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	267,237,413,000	-	(267,237,413,000)
				-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	210,927,145,746	50,600,678,060	(160,326,467,686)
1.3.1	Pendapatan Hibah	9,000,000,000	3,000,000,000	(6,000,000,000)
1.3.2	Dana Darurat		-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi	50,521,191,746	47,600,678,060	(2,920,513,686)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	151,405,954,000	-	(151,405,954,000)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah	-	-	-
				-
	JUMLAH PENDAPATAN	1,469,886,855,816	1,041,431,885,063	(428,454,970,753)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2017)

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah Tahun 2018

Pada dasarnya kebijakan pendapatan daerah merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum pendapatan. Dengan demikian kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan terutama meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan kemandirian daerah.

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, maka upaya – upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melalui :

- Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai

peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dengan pihak swasta dalam penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

- Ektensifikasi dan intensifikasi pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian-pengkajian terhadap sumber-sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru.
3. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, upaya pemerintah dalam mencapai target yaitu dengan :
- Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun propinsi dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penambahan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (Bonus PBB, PPh Pasal 21 dll) ; peningkatan bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para investor dan pihak swasta dalam menggali potensi pendapatan daerah
 - Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

4.2 BELANJA DAERAH

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara

Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan. Pada tahun 2018, total Belanja Daerah Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 1.024.431.885.062,83. Proyeksi ini mengalami penurunan sebesar Rp.532.003.710.242,17 bila dibandingkan total Belanja Daerah pada APBD tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.1.556.435.595.305,-. Secara umum Belanja Daerah tahun 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.722.711.404.942,- atau berkurang sebesar Rp. 231.242.993.299,- dibandingkan alokasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 953.954.398.241,-. Dan Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp. 301.720.480.121,-

Adapun yang termasuk jenis Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan termasuk Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung ini dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk: Pemenuhan Pelayanan Dasar (pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum); Isu Aktual; Pemecahan terhadap masalah mendesak; Pemecahan Pelayanan Khusus (Sinkronisasi Program, Program Strategis); serta Program berkelanjutan dan upaya untuk menyelesaikan kegiatan strategis yang belum rampung.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai

dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan, prinsip efisiensi, efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan adalah dengan menekan pos-pos belanja yang dianggap tidak tepat. Belanja untuk perjalanan dinas ditekan sampai level yang wajar, studi-studi banding ditiadakan karena *input* dan *output* dianggap tidak seimbang.

Kebijakan untuk anggaran belanja lebih difokuskan untuk pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah ada. Pembangunan baru ditujukan kepada hal-hal yang memang sudah sepatutnya untuk dibangun. Pembangunan sarana dan prasarana untuk kampung-kampung yang tergolong tertinggal terus ditingkatkan dan dipacu agar bisa sejajar dengan kampung lainnya.

Anggaran untuk belanja yang bersifat sebagai penunjang suatu kegiatan, seperti pembelian ATK, BBM dan sebagainya diberi patokan/standar agar efisiensi anggaran dapat diwujudkan. Hal ini diberlakukan terhadap belanja langsung dan belanja tak langsung.

Tabel 4.4
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018

Uraian	APBD 2017 (Rp)	Proyeksi Anggaran 2018 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
Belanja Daerah	1,556,435,595,305	1,024,431,885,063	(532,003,710,242)
Belanja Tidak Langsung	953,954,398,241	722,711,404,942	(231,242,993,299)
Belanja Pegawai	692,336,395,742	615,435,210,814	(76,901,184,928)
Belanja Bunga	9,000,000,000	6,860,399,826	(2,139,600,174)
Belanja Hibah	11,983,300,000	5,000,000,000	(6,983,300,000)
Belanja Bantuan Sosial	200,000,000	200,000,000	-
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	4,266,008,558	4,408,046,389	142,037,831
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	233,668,693,941	88,307,747,913	(145,360,946,028)
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	-
Belanja Langsung	602,481,197,064	301,720,480,121	(300,760,716,943)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
JUMLAH BELANJA	1,556,435,595,305	1,024,431,885,063	(532,003,710,242)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2017)

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2018, kebijakan yang dilakukan untuk Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

- Belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD, juga gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Belanja pegawai tersebut dianggarkan pada masing-masing SKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2016 menganggarkan belanja hibah, dengan kebijakan :

- Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2016 menganggarkan belanja bantuan sosial, dengan kebijakan :

- Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat dan partai politik.
- Diberikan secara selektif, tidak terus-menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2016 menganggarkan belanja bantuan keuangan, dengan kebijakan :

- Bantuan kepada pemerintah desa dapat berupa bersifat umum atau khusus.
- Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kriteria kegiatan bantuan harus berada pada koridor untuk mendukung program pemerintah pemberi bantuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2016 menganggarkan belanja tidak terduga, dengan kebijakan :

- Dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Anggaran ini untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

Untuk mewujudkan usaha tersebut, maka untuk tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tema pembangunan yang akan menjawab isu pembangunan yang ada. Tema pembangunan 2018 adalah **“Melalui Sinergi Perencanaan Nagari dan Kabupaten Kita Wujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Angka Pengangguran”**.

Untuk mengimplementasikan tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Berdampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan.
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.

4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya.
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan, isu strategis dan sinkronisasi program pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta berdasarkan agenda pembangunan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 disinkronkan dan mempedomani prioritas pembangunan nasional yaitu Nawa Cita yang merupakan, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Melihat pencapaian hasil pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 dalam kerangka pembangunan nasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Evaluasi RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 yang telah dilakukan, beberapa target dan sasaran pembangunan yang saat ini

masih perlu mendapat perhatian sehingga menjadi prioritas Kebijakan Umum APBD tahun 2018 antara lain:

- penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah,
- penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
- penyelenggaraan layanan kependudukan,
- penyelegaraan layanan bagi masyarakat miskin anak terlantar,
- pembangunan dan pembenahan infrastruktur dalam mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat.
- Melengkapi sarana dan prasarana penunjang untuk penguatan penyelenggaraan e-government,
- Penguatan peran kecamatan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di nagari,
- Pembenahan sarana prasarana public di ibukota kecamatan antara lain drainase, trotoar, penerangan jalan dan pelayanan persampahan.

2. Beberapa prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 antara lain:

- 1) Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
- 3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan;
- 4) Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing;
- 5) Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
- 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis;
- 7) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan;
- 8) Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran;
- 9) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima;
- 10) Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang.

3. Selanjutnya dalam mendukung prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018, Kebijakan Umum APBD 2018 diarahkan untuk:
 - Mendukung upaya pembangunan manusia dan masyarakat;
 - Mendukung pengembangan sektor unggulan berbasis pemberdayaan di bidang kedaulatan pangan, energi, maritim, pariwisata, industri, infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - Mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan melalui perlindungan sosial, menekan kemiskinan, pengangguran dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin;
 - Mendukung pembangunan kewilayahan dan antar wilayah diantaranya penguatan nagari dan pengembangan kawasan strategis.

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

A. Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Urusan tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial serta meningkatkan daya saing daerah.

B. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibagi atas dua kelompok besar yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD dalam rangka mencapai kinerja yang ingin dicapai, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang digunakan untuk membayar gaji aparatur yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) SKPD yang bersangkutan.

Pada tahun 2018 Kebijakan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan adalah dengan menekan pos-pos belanja yang dianggap tidak tepat. Belanja untuk perjalanan dinas ditekan sampai level yang wajar, studi-studi banding ditiadakan karena *input* dan *output* dianggap tidak seimbang.

Kebijakan untuk anggaran belanja lebih difokuskan pada pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah ada serta melengkapai sarana yang sangat dibutuhkan. Pembangunan untuk kampung-kampung yang tergolong tertinggal terus ditingkatkan dan dipacu agar bisa sejajar dengan kampung lainnya.

Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk waktu yang akan datang diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kebijakan tersebut diambil mengingat masih besarnya jumlah pengangguran serta masih tingginya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Anggaran untuk belanja yang bersifat sebagai penunjang suatu kegiatan, seperti pembelian ATK, BBM dan sebagainya diberi patokan/standar agar efisiensi anggaran dapat diwujudkan. Hal ini diberlakukan terhadap belanja langsung dan belanja tak langsung. Khusus pada SKPD Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah disamping gaji, masih terdapat belanja tidak langsung lain seperti hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman,

serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2018 adalah :

1. Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SiLPA tahun yang lalu untuk menutupi deficit anggaran.
2. Merevitalisasi dan merestrukturisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
3. Penyertaan modal terhadap Bank Nagai serta PT. Tirta Langkisau (PDAM).
4. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi. Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 56 dinyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka pemerintah daerah diizinkan untuk memakai pola anggaran defisit, asal masih dalam *level* aman (berkisar 2,5% dari PDRB). Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah daerah diizinkan untuk mengeluarkan surat hutang (*treasury bond*) setelah mendapat izin dari pemerintah pusat dan DPRD setempat

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan

tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk melakukan investasi yang mendatangkan *profit*. Salah satunya adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada sektor di mana pelaku usaha belum berani bergerak di bidang tersebut karena memerlukan modal besar dan tidak mendatangkan keuntungan langsung (*social cost*). Investasi yang dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham suatu badan usaha, baik itu BUMN, BUMD atau Perseroan Terbatas. Selain kepemilikan perusahaan secara pasif, pemerintah daerah bisa juga mendirikan suatu perseroan bekerjasama dengan pihak swasta. Investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai salah satu pemegang saham Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat). Selain itu alokasi dana pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

- c. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggaran Pembiayaan Daerah tahun 2018 direncanakan sebesar minus Rp. 17.000.000.000,- yang disebabkan oleh defisit selisih antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan tahun 2018 diproyeksikan sebesar 30.000.000.000,- yang berasal dari perkiraan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2017. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 47.000.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Untuk lebih jelas kondisi pembiayaan daerah untuk tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2018

No.	Uraian	APBD 2017 (Rp)	Proyeksi 2018 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
3	PEMBIAYAAN DAERAH	86,548,739,489	(17,000,000,000)	(103,548,739,489)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	138,736,739,489	30,000,000,000	(108,736,739,489)
3.1.1	SILPA	75,699,354,489	30,000,000,000	(45,699,354,489)
3.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (PIP)	63,037,385,000	-	(63,037,385,000)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
				-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	52,188,000,000	47,000,000,000	(5,188,000,000)
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23,888,000,000	15,000,000,000	(8,888,000,000)
	Pembayaran Pokok Utang	28,300,000,000	32,000,000,000	3,700,000,000

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2017)

BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

